SUSUNAN REDAKSI

Penasehat : Dekan Fakultas Hukum Unsri

Penanggung jawab : Usmawadi, SH.,MH

Ketua Penyunting : Syahmin AK.,SH.,MH

Sekretaris Penyunting : Malkian Elvani, SH.,M.Hum.

Penyunting Ahli :
1. Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,PhD (Unsri)
2. Prof. Dr. H. Edi Warman, SH.,MH (USU)
3. Prof. Dr. H. Kadri Husin, SH.,MH (Unila)
4. Prof. Dr. H. Takdir Rachmadi, SH.,LL.M (Unand)
5. Prof. H. Slamet Rajardjo, SH (Untan)

Penyunting Pelaksana:
1. Dr. Zen Zanibar, SH.,M.Hum
2. H. Azhar, SH., MSc.,LL.M.,LL.D
3. Dr. Febrian, SH.,MS
4. Dr. Joni Emirzon, SH.,M.Hum
5. Dr. Happy Warsito, SH.,M.Sc
6. Albar Sentosa Subari, SH.,SU
7. Mada Apriandi Zuhir, SH.,MCL
8. Syarifuddin Pettanase, SH.,MH
9. Rosmala Polani, SH.,MH
10. Nashriana, SH.,M.Hum
11. Sri Tratmiyah, SH.,M.Hum
12. Arfianna Novera, SH.,M.Hum

Staf Administrasi :
1. Indah Febriani, SH.,MH
2. Akhmad Idris, SH
3. Fahmi Raghib, SH.,MH

Alamat Redaksi : Jln. Raya Palembang - Prabumulih Km 32 Inderalaya
Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telopon: (0711) 580063 Fax: (0711) 581179

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI iii

Legal Memorandum
Oleh: Syahmin AK., S.H., M.H 795-814

Upaya Mengatasi Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan UU No.17/ 2008 Tentang Pelayaran
Oleh: Arfianna Novera, S.H., M.Hum 815-828

Paradigma Legislasi Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan
Oleh: Agus Ngadino, S.H., M.H 829-848

Perjanjian Kerjasama Antara Modal Asing dan Modal Nasional
Oleh: Sri Turatmiah, S.H., M.Hum 849-864

Reformasi Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik
Oleh: Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum 865-880

Rendahnya Tingkat Pengaduan Kasus Konsumen Perempuan di BPSK Kota Palembang
Oleh: Elvira Taufani, S.H., M.Hum 881-896

Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif
Oleh: Abunawar Baseban, S.H 897-934

PENGANTAR PENYUNTING

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridho-Nya jua, Majalah Simbur Cahaya edisi 37 ini dapat terbit. Dalam edisi kali ini berbagai tulisan baik berupa Artikel Ilmiah, maupun berupa Laporan hasil Penelitan lainnya dapat kami tampilkan. Berbagai upaya dilakukan oleh para penyunting untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan para pembaca yang budiman.

Pada edisi ini kajian diawali dengan menampilkan hasil pembahasan tentang Legal Memorandum Oleh: **Syahmin AK., S.H., M.H.** ; Upaya Mengatasi Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan UU No.17/2008 Tentang Pelayaran Oleh: **Arfianna Novera, S.H., M.Hum.** ; Paradigma Legislasi Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Oleh: **Agus Ngadino, S.H., M.H.** Perjanjian Kerjasama Antara Modal Asing dan Modal Nasional Oleh: **Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.** ; Reformasi Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Oleh: **Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.**; Rendahnya Tingkat Pengaduan Kasus Konsumen Perempuan di BPSK Kota Palembang Oleh: **Elvira Taufani, S.H., M.Hum.** ; Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Oleh: **Abunawar Baseban, S.H.**

Namun betapa teliti dan cermatnya redaksi, tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sebab itu redaksi tetap mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk meningkatkan mutu penerbitan majalah ini.

Indralaya, September 2008

Redaksi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

Jimly assiddiqie, Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara, Penerbit Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.

————, Format Kelembagaan Begara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Penerbit FH UI Press, Yogyakarta, 2005

La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2005.

Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong, Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonsia, Jakarta 1978.

SP. Siagian, Filsafat Administrasi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta 1970.

Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang pengawasan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 hlm 17. Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang pengawasan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Sukarna, Sistem Politik, Penerbit Alumni Bnadnung, 1979.

Soepomo, dalam buku Yamin;Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1970.

Koran dan Majalah

Majalah Simbur Cahaya No. 5, Amzulian Rifai, Kendala dan Solusi dalam Meningkatkan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara, Inderalaya, 1997.

Majalah Simbur Cahaya No.5,Jimly Assiddiqie, Lembaga Kontrol atau Lembaga Legislatif (Analisis tehadap fungsi parlemen), Inderalaya, 1997.

Kompas, 22 Agustus 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amademen.

Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahan –bahan dari Internet

www. Google.com, Imam Suharjo, Indonesia (Belum) Merdeka, diakses tanggal 6 Februari 2007.

www. Google.com, Artikel Ngarto Februana, Gerakan Mahasiswa 98: Perlu Sebuah Parameter, diakses tanggal 6 february 2007.

www. Google.com, Soeharto Bertanggungjawab Terhadap Kekuasaan Mafia Orde Baru, 16 November 1996, Diakses Tanggal 6 February 2007.

www. Google.com, Pidato Ketua Rapat Paripurna DPR RI Peringatan HUT MPR/DPR RI ke 61, tanggal 26 Agustus 2006, diakses tanggal 6 Februari 2007.

www. Google.com, Peran Pengawasan DPR "Meningkatkan Kualitas Pengawasan Terhadap Eksekutif", Diakses tanggal 15 January 2007.

www. Google.cim, Joko Riyanto, DPR sekedar Tukang stempel 21 Februari 2006, Diakses tanggal 7 February 2007.

www. Google.com. Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2005-2006, Sumber Sekjen DPR RI, 10 Mei 2006, Diakses tanggal 7 February 2007.

www. Google.com, Joko Riyanto, DPR sekedar Tukang stempelm 21 Februari 2006, Diakses tanggal 7 February 2007.

www. Google.com, Mepertanyakan Hemogeni Recall Anggota DPR di tangan Partai Politik, 21 Januari 2007, diakses Tanggal 10 Februari 2007

www. Google.com, Intitusi Kepresidenan dalam Sistem Hukum Indonesia, diakses tanggal 21 Januari 2007.

www. Gogle.com, wikipedia, Dewan Perwakilan Rakyat, Diakses Tanggal 22 Januari 2007

www. Google.com, Y.Hartono, Supremasi Eksekutif ke Supremasi di legislatif, diakses tanggal 7 maret 2007.

www. Google.com Eryanto Nogroho dan Reny Rawasita Parasib, Sejarah DPR, diakses tanggal 7 Maret 2007

www. Google. Com, Zaenal Ma'arif dari Partai Bintang Reformasi pun terancam direcall gara-gara poligami, diakses tanggal 7 april 2007.

www. Forum-politisi.co,id, Peran Pengawas DPR "Meningkatkan Kualitas Pengawasan terhadap Eksekutif", diakses tanggal 15 januari 2007.

www.dpr.go.id, diakses tanggal 22 Januari 2007